

ABSTRAK

KESENJANGAN PASAL 440 UNDANG-UNDANG KESEHATAN DAN PASAL 360 KUHP DALAM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TENAGA KESEHATAN (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1241 K/Pid/2025)

Maryanto (2410622060), Abdul Kolib, Handar Subhandi Bakhtiar

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur Pasal 440 ayat (1) sebagai norma khusus (*lex specialis*) untuk pertanggungjawaban pidana tenaga kesehatan atas kelalaian medis yang mengakibatkan luka berat. Pasal ini mengancam pidana penjara paling lama 3 tahun. Namun, pengadilan dalam praktiknya justru mengesampingkan ketentuan tersebut. Pengadilan konsisten menerapkan Pasal 360 ayat (1) KUHP sebagai norma umum dengan ancaman pidana lebih berat, yaitu 5 tahun. Kondisi ini menciptakan kesenjangan normatif antara *das sollen* dan *das sein*. Kesenjangan tersebut mengancam kepastian hukum bagi tenaga kesehatan maupun pasien. Penelitian ini menganalisis pengaturan status dan kewenangan tenaga kesehatan dalam sistem hukum Indonesia serta implikasinya terhadap pertanggungjawaban pidana. Penelitian ini juga menganalisis kesenjangan normatif dalam penerapan Pasal 440 UU Kesehatan beserta faktor penyebabnya. Penelitian menggunakan tipe yuridis sosiologis bersifat deskriptif analitis. Penelitian mengintegrasikan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1241 K/Pid/2025. Kasus ini melibatkan perawat tanpa STR dan SIP yang melakukan sunat di luar fasilitas resmi dan mengakibatkan cacat permanen pada anak korban berusia 4 tahun. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengadilan di semua tingkatan, dari Pengadilan Negeri Cibinong, Pengadilan Tinggi Bandung, hingga Mahkamah Agung, mengabaikan Pasal 440 UU Kesehatan tanpa argumentasi normatif memadai. Pengadilan bahkan menyimpangi tuntutan jaksa yang telah tepat menuntut berdasarkan Pasal 440. Temuan ini mengindikasikan adanya *conflict of norms*, *overlapping norms*, dan *vague norm*. Masalah ini diperparah oleh tidak berjalannya mekanisme Majelis Disiplin Profesi sesuai Pasal 304 dan 310 UU Kesehatan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembentuk undang-undang dan Mahkamah Agung perlu menyusun pedoman teknis. Pedoman ini akan menegaskan kriteria penerapan Pasal 440 sebagai *lex specialis* yang wajib diutamakan dalam perkara kelalaian medis.

Kata Kunci: Kesenjangan Normatif; Kelalaian Medis; Pertanggungjawaban Pidana Tenaga Kesehatan.

ABSTRACT

THE DISCREPANCY BETWEEN ARTICLE 440 OF THE HEALTH LAW AND ARTICLE 360 OF THE CRIMINAL CODE IN THE CRIMINAL LIABILITY OF HEALTH WORKERS

(A Case Study of the Supreme Court Decision Number 1241 K/Pid/2025)

Maryanto (2410622060), Abdul Kolib, Handar Subhandi Bakhtiar

Law Number 17 of 2023 on Health regulates Article 440 paragraph (1) as a special norm (lex specialis) for the criminal liability of health workers for medical negligence resulting in serious injury. This article threatens imprisonment for a maximum of 3 years. However, courts in practice set aside this provision. Courts consistently apply Article 360 paragraph (1) of the Criminal Code as a general norm with a heavier penalty threat of 5 years. This condition creates a normative gap between das sollen and das sein. This gap threatens legal certainty for both health workers and patients. This research analyzes the regulation of the status and authority of health workers in the Indonesian legal system and its implications for criminal liability. This research also analyzes the normative gap in the application of Article 440 of the Health Law and its causal factors. The research uses a sociological juridical type with descriptive analytical characteristics. The research integrates statutory, conceptual, and case study approaches through Supreme Court Decision Number 1241 K/Pid/2025. This case involves a nurse without STR and SIP credentials who performed circumcision outside official facilities, resulting in permanent disability to a 4 year old child victim. The analysis results show that courts at all levels, from Cibirong District Court, Bandung High Court, to the Supreme Court, disregarded Article 440 of the Health Law without adequate normative argumentation. Courts even deviated from the prosecutor's charges, which had correctly invoked Article 440. These findings indicate the presence of conflict of norms, overlapping norms, and vague norms. This problem is worsened by the non functioning mechanism of the Professional Disciplinary Council as mandated by Articles 304 and 310 of the Health Law. This research concludes that lawmakers and the Supreme Court need to develop technical guidelines. These guidelines should affirm the criteria for applying Article 440 as a lex specialis that must be prioritized in medical negligence cases.

Keywords: Normative Gap; Medical Negligence; Criminal Liability of Health Workers.